

## Ideologi State Ibuism Pada Gerakan PKK Di Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Kartika Dwi Rahyu<sup>1)</sup>, Novia Kencana<sup>2)</sup>, Isabella<sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri

<sup>1)</sup>Jend. Sudirman No. 629 KM. 4 Kode Pos : 30129

Email : [kartikadwr12@gmail.com](mailto:kartikadwr12@gmail.com)<sup>1)</sup>, [kencananovia@uigm.ac.id](mailto:kencananovia@uigm.ac.id)<sup>2)</sup>, [isabella@uigm.ac.id](mailto:isabella@uigm.ac.id)<sup>3)</sup>

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the ideology of state ibuism in the PKK movement in the village of Sumber Agung Keluang Subdistrict Musi Banyuasin. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Data collection uses the method of participatory observation, in-depth interviews, and documentation. To achieve this goal, the researcher collected data using literature. The results of the observations of the researchers showed that in ideology of State Ibuism in the PKK movement in Sumber Agung Village, Subdistrict Musi Banyuasin Regency was still thickly measured based on Moser theory analysis. First, there is no equality in the activities of the PKK organization movement which in male decision-making is still dominant. Second, there is no justice in the movement of the PKK organization. Third, anti-poverty in the PKK organization movement has succeeded but only within its internal scope. Fourth, efficiency in the PKK organization movement is still not good. Fifth, strengthening and empowerment within the PKK organizational movement is still not good. From the conclusion the role and economic impact of the PKK activity program has not yet proceeded properly. So it needs counseling and socialization of optimal community empowerment as a solution in improving the welfare of the village of Sumber Agung, Keluang District, Musi Banyuasin Regency.*

**Keywords:** Ideologi State Ibuism, PKK Sumber Agung Village, Moser.

### ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ideologi state ibuisme pada gerakan PKK di desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah pengurus dan anggota kelompok PKK desa Sumber Agung. Pengumpulan data menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti mengumpulkan data menggunakan kajian literatur dengan jenis penelitian Grounded Theory. Hasil observasi peneliti menunjukkan ideologi State Ibuisme pada gerakan PKK di Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin masih kental diukur berdasarkan analisis teori Moser. Pertama, kesetaraan didalam kegiatan gerakan organisasi PKK belum ada yang mana dalam pengambilan keputusan masih dominan laki-laki. Kedua, keadilan didalam gerakan organisasi PKK sudah ada yang mana dalam rekrutmen pengurus PKK dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalaman disetiap pokja. Ketiga, anti kemiskinan dalam gerakan organisasi PKK sudah berhasil namun hanya dalam ruang lingkup internalnya saja, sedangkan dalam ruang lingkup eksternalnya PKK belum bisa untuk merubah nilai pendapatan perekonomian masyarakat sekitar. Keempat, efisiensi dalam gerakan organisasi PKK masih kurang baik, yang mana masih kurangnya partisipasi dari masyarakat, dan untuk masalah dana masih belum adanya transparansi kepada anggota PKK. Kelima, penguatan dan pemberdayaan didalam gerakan organisasi PKK sudah baik hal tersebut dilihat dari sudah mempunyai organisasi PKK desa untuk dapat memberdayakan kader dan anggotanya dalam berorganisasi. Peran dan dampak ekonomi dalam program kegiatan PKK belum berjalan semestinya. Maka diperlukan penyuluhan dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat yang optimal sebagai solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.*

**Kata kunci :** Ideologi State Ibuisme, PKK desa Sumber Agung, Moser.

**1. Pendahuluan**

‘Ibuisme negara’ adalah ideologi gender bentukan Orde Baru yang menempatkan perempuan dalam peran idealnya bagi negara, yaitu sebagai istri, pendamping dan pendukung suami, sebagai ibu dan pendidik bagi anak-anaknya, dan sebagai aktor yang bertanggung jawab menyiapkan generasi penerus bangsa. Negara membentuk organisasi-organisasi perempuan yang bertujuan membantu perempuan mencapai peran idealnya salah satunya PKK.

Sebagai organisasi bentukan pemerintah, organisasi PKK sebagai perantara pemerintah kaum perempuan desa, tidak otonom dari politik dan kekuasaan negara, karena dimasa Orde Baru organisasi PKK merupakan manifestasikan diri dari kontruksi “keperempuanan” yang dikehendaki Orde Baru. Orde Baru dengan begitu ketatnya mengkontrol tataan kehidupan perempuan melalui organisasi PKK Aproduksi ideologi tentang “istri dan ibu” yang baik dalam keluarga atau yang dikenal dengan istilah ideologi “ibuisme negara. dalam ideologi tersebut, perempuan indonesia dengan sengaja dikondisikan kedalam peran tradisional sebagai “istri dan ibu yang baik di dalam keluarga”, selain itu juga ideologi “ibuisme negara” menjadikan alat untuk melenggengkan dan menyuburkan nilai-nilai patriarki negara sebagai keabsahan kekuasaan pembangunan politik pemerintahan

Pada masa Orde Baru nama PKK adalah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, sedangkan pada Masa Reformasi berubah menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Kata pendidikan dan pemberdayaan jelas memiliki makna yang berbeda sehingga tujuan dari PKK pun berubah mengikuti perubahan kata. Penekanan dari kegiatan PKK tidak lagi pada upaya mendidik perempuan tetapi pada upaya memberdayakan perempuan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Perubahan sistem pemerintahan Orde Baru ke Era Reformasi di asumsikan akan membawa perubahan signifikan pada organisasi PKK sebagai organisasi pembentukan Orde Baru yang mempunya *Ideologi State Ibuisme*. Adanya asumsi penting bahwa perubahan organisasi secara kelembagaan yang didukung oleh berbagai regulasi akan membuat organisasi PKK lebih egaliter, dinamis dari sebelumnya.

Metodelogi dalam penelitian ini penulis menyelesaikan menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan “Kualitatif”, pendekatan Deskriptif Analisis memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai kondisi serta situasi yang timbul ditengah masyarakat. Objek penelitian di Organisasi PKK desa Sumber Agung, meliputi peran gerakan PKK didesa

Sumber Agung dan pengaruh dalam ekonomi sosial di masyarakat desa Sumber Agung.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, sumber data primernya langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya perempuan di dalam organisasi PKK desa Sumber Agung. Sumber data sekundernya langsung dikumpulkan peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen di dalam organisasi PKK desa Sumber Agung.

Informan dipilih secara *purposeive* dan *key person*. *Key person* ini digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian, sehingga membutuhkan *key informan* untuk melakukan wawancara mendalam, *key informan* ini adalah anggota dan kader organisasi PKK desa Sumber Agung yaitu Ibu Tania Pramaisella selaku ketua PKK desa Sumber Agung yang memberikan informasi mengenai kegiatan PKK, serta sebagai informan yang memberikan fasilitas tentang informasi berkas yang dibutuhkan dan informan kunci organisasi PKK desa Sumber Agung yang secara lengkap mengetahui informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian sebanyak 6 orang (Perempuan).

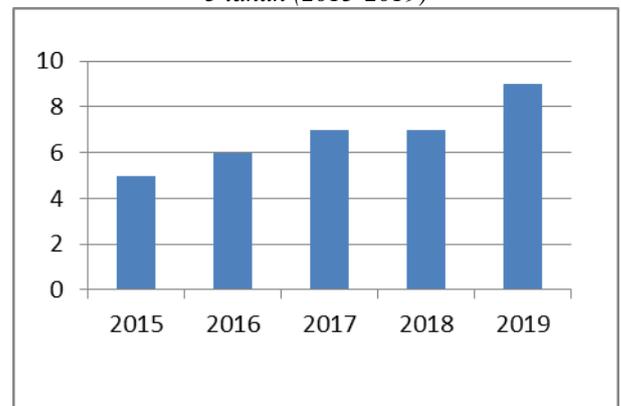
**2. Pembahasan**

*A. Peranan Perempuan di Dalam Gerakan PKK Desa Sumber Agung*

Perempuan merupakan bagian dari warga negara yang perlu diberdayakan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara guna mencapai *millenium development goals*. Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan seperti: pengambilan keputusan, struktur atau jalur yang menunjang.

1. Peran Reproduksi

**Grafik 1.** Grafik Kemajuan 10 Program PKK selama 5 tahun (2015-2019)



Sumber: Data dari organisasi PKK desa Sumber Agung, 2019.

Berdasarkan grafik diatas, tahun 2019 mengalami kemajuan. Dimana 5 tahun terakhir ini bahkan mengalami peningkatan kemajuan terlaksananya 10

program PKK di desa Sumber Agung. Hal tersebut juga dirasakan oleh ibu Retno Fitriani selaku ketua pokja 1 dan ibu Yanti selaku ketua Pokja 4 serta Bidan didesa Sumber Agung dalam wawancara pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019:

*“Saat ini kegiatan PKK desa Sumber Agung sudah mulai lebih aktif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.”*

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Sumarni sebagai ketua Pokja 2 dalam wawancara pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019:

*“Saya selaku ketua Pokja 2 tentang ketrampilan, saat ini PKK sudah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, dimana 2 tahun ini PKK desa Sumber Agung sudah bisa membuat kerajinan bunga dari barang bekas plastik yang kemudian dijual.”*

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Tania Pramaisella selaku Ketua PKK desa Sumber Agung dalam wawancara pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019:

*“Memang benar, PKK desa Sumber Agung baru mulai aktif kembali 3-2 tahun belakangan ini, sebelumnya kegiatan PKK desa Sumber Agung tidak begitu berjalan, alhamdulillah saat ini program PKK sudah hampir berjalan semuanya.”*

PKK desa Sumber Agung saat ini sudah mulai melakukan kegiatan berwirausaha yang dilakukan oleh anggota dan kader PKK desa. Wirausaha yang dilakukan oleh anggota PKK desa Sumber Agung yaitu membuat kerajinan bunga hiasan rumah menggunakan barang bekas botol air minum plastik. Dari hasil kerajinan tersebut di perjual-belikan sehingga bisa menambah penghasilan anggota dan kader PKK desa Sumber Agung.

Berdasarkan temuan hasil observasi menunjukkan menunjukkan bahwa peran reproduksi yang menggiring perempuan untuk melakukan pekerjaan domestik rumah tangga didalam organisasi PKK di desa Sumber Agung masih ada, dimana anggota PKK diberdayakan melalui *recayle* barang bekas yang merupakan pekerjaan domestik.

## 2. Peran Produktif

Salah satu indikasi peran produktif dimana perempuan mampu berkompetisi bekerja diluar rumah dengan laki-laki untuk memberikan suatu nilai dalam perekonomian dan kesejahteraan.

Masyarakat perempuan di desa Sumber Agung banyak dari mereka yang bekerja di ladang untuk membantu suaminya memenuhi perekonomian rumah tangganya hal tersebut diungkapkan oleh ibu Betty anggota PKK yang bekerja sebagai Petani dalam wawancara pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019:

*“Saya hanya seorang petani, sekolah hanya sebatas SD. Saya tidak mempunyai ilmu dan pengalaman apa-apa untuk menjadi pengurus PKK, masih banyak yang sekolah tinggi yang memiliki pengetahuan yang tinggi untuk menjadi pengurus PKK.”*

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Ketua PKK dalam wawancara pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019:

*“Rata-rata anggota PKK bekerja sebagai petani, pedagang. Sehingga mereka tidak bisa mengikuti kegiatan PKK secara aktif, bahkan dari mereka masih*

*banyak yang tidak mau untuk menjadi pengurus di setiap pokja dengan alasan minder yang disebabkan karena hanya lulusan SD. Tetapi meskipun begitu, kalau mereka tidak lagi berkebun diladang mereka pasti membantu ketua Pokja ketika ada kegiatan.”*

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu Yanti ketua Pokja 4 dalam wawancara pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019:

*“Sebernarnya struktur pengurus hanya nama saja, kalau ada kegiatan anggota disetiap pokja saling membantu, namun karena anggota PKK banyak dari kalangan masyarakat yang memiliki kegiatan diluar dan tidak bersekolah tinggi mereka malu untuk menjadi pengurus PKK desa Sumber Agung.”*

Berdasarkan temuan hasil observasi menunjukkan bahwa peran produktif perempuan di desa Sumber Agung sudah ada, dimana kebanyakan dari perempuan di desa tersebut bekerja diluar rumah sebagai PNS, petani, dan pedagang untuk membantu suaminya dalam memenuhi perekonomian keluarganya.

## 3. Peran Sosial dan Komunitas

Dalam sub bab indikator ini peran sosial dan komunitas menurut teori Moser dimana perempuan berada dalam tatanan sosial masyarakat memiliki peran penting di dalam pembangunan dan pemberdayaan.

Salah satu indikasi peran sosial dan komunitas dimana perempuan berada dalam tatanan adalah ketika perempuan duduk dalam struktur organisasi dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Keanggotaan organisasi PKK di desa Sumber Agung membuktikan bawasannya semua anggota yang ada di dalam PKK semua perempuan, tidak ditemukan laki-laki ada di dalam organisasi PKK ini, meskipun telah jelas terdapat perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, menjelaskan bawasannya gerakan organisasi PKK bukan hanya milik perempuan tetapi juga milik laki-laki, namun di desa Sumber Agung perubahan peraturan tersebut belum juga merubah keikutsertaan keanggotaan PKK.

Keikutsertaan laki-laki menjadi anggota PKK di dalam organisasi PKK belum ada, namun laki-laki masih memiliki posisi penting bahkan sebagai penentu pengambilan keputusan. Berdasarkan observasi penelitian, laki-laki masih mendominasi didalam menentukan kebijakan atau pengambil keputusan. Hal tersebut dapat dilihat dalam melakukan penentuan kegiatan, dimana organisasi PKK harus meminta persetujuan dari laki-laki yaitu suami ketua PKK sebagai kepala desa di desa tersebut. Seperti yang diungkapkan ibu Puji Lestari selaku sekretaris Organisasi PKK dan ibu Anita sebagai anggota PKK desa Sumber Agung dalam wawancara pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019: *“Setiap kali kami akan mengadakan suatu acara atau kegiatan dalam organisasi PKK, kami harus mendapatkan persetujuan dari suami ibu PKK selaku Kepala Desa di desa Sumber Agung, selain itu juga subsidi dari pemerintah untuk organisasi PKK dipegang oleh Kepala Desa sehingga kami harus meminta izin*

setiap kali akan membutuhkan dana dan juga akan melakukan sebuah kegiatan.”

Sehingga posisi perempuan didalam organisasi PKK tersebut belum setara dengan laki-laki, dimana laki-laki masih menjadi penentu keputusan di dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh PKK hal tersebut di ungkapkan Ibu Mita Sari dalam wawancara pada hari selasa, tanggal 11 Juni 2019:

*“Ketika kami akan mengadakan kegiatan kampung sehat yang digerakan oleh Organisasi PKK, kami harus menunggu dulu keputusan persetujuan dari Kepala Desa.”*

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk kegiatan organisasi PKK diturunkan langsung ke desa yang dipegang langsung oleh bapak Kepala Desa Sumber Agung, hal tersebut diungkapkan oleh ibu Warni selaku Bendahara PKK dalam wawancara pada hari selasa, tanggal 11 Juni 2019:

*“Uang subsidi yang diberikan pemerintah untuk program PKK di pegang langsung oleh bapak kepala desa, sehingga setiap akan melakukan sebuah kegiatan kami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari bapak kepala desa.”*

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Retno Fitriani selaku ketua pokja 1 dalam wawancara pada hari selasa, tanggal 11 Juni 2019:

*“Setiap akan melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh PKK kami harus menunggu persetujuan dari kepala desa, karena subsidi yang diberikan pemerintah dipegang oleh kepala desa.”*

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Tania Pramaisella selaku Ketua PKK desa Sumber Agung dalam wawancara pada hari selasa, tanggal 11 Juni 2019:

*“Setiap akan mengadakan suatu kegiatan PKK, harus terlebih dahulu untuk meminta persetujuan dari suami saya, karena bapak merupakan kepala desa di desa ini jadi memiliki wewenang, sehingga segala sesuatu yang akan dilakukan harus meminta persetujuan dari bapak terlebih dahulu.”*

Anggaran dana merupakan salah satu yang menghambat berjalannya program kegiatan PKK secara baik, karena selama ini ibu-ibu PKK itu hanya mengandalkan dari uang kas saja sebesar 15 ribu/minggu, hal tersebut diungkapkan oleh ibu Winingsih sebagai Wakil Ketua PKK dalam wawancara pada hari selasa, tanggal 11 Juni 2019:

*“PKK di desa ini memiliki uang khas yang dikumpulkan setiap minggunya 15 ribu, jadi kalau ada kegiatan PKK uang khas digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut, tapi kalau uang khas kurang biasanya anggota PKK iuran”*

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Warni sebagai Bendahara dalam wawancara pada hari selasa, tanggal 11 Juni 2019:

*“Anggota PKK setiap minggunya mengumpulkan uang khas sebesar 15 ribu rupiah.”*

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Tania Pramaisella sebagai ketua PKK dalam wawancara pada hari selasa, tanggal 11 Juni 2019:

*“Anggota PKK wajib mengumpulkan uang khas yang dilakukan tiap minggunya sebesar 15 ribu rupiah, guna membantu ketika ada kegiatan program PKK.”*

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan kepada informan, hal tersebut menunjukkan peran sosial dan komunitas di dalam organisasi PKK desa Sumber Agung belum ada, dimana laki-laki masih mendominasi didalam menentukan kebijakan dan keputusan suatu program kegiatan yang akan dilakukan PKK dan anggota perempuan PKK belum mampu untuk mengambil keputusan sendiri, hal tersebut disebabkan karena adanya pemikiran kepala desa sebagai bapak di desa tersebut sehingga memiliki wewenang untuk mengetahui segala program kegiatan yang akan dilakukan dan juga kepala desa yang memegang subsidi untuk PKK, sehingga untuk melakukan kegiatan haruslah memiliki persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa.

## B. Faktor Pendukung dan Penghambat

### 1. Kesetaraan

Dalam sub bab indikator ini kesetaraan dalam teori Moser adalah dimana semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan gender. Dimana perempuan dilibatkan dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi kesetaraan di dalam organisasi PKK sudah ada yang mana Tim Penggerak PKK kebanyakan dari kalangan PNS, sehingga gerakan PKK di Desa Sumber Agung dapat memberikan suatu perubahan

### 2. Keadilan

Dalam sub bab indikator ini keadilan berdasarkan teori Moser adalah tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya dan mensejajarkan perempuan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi keadilan di dalam organisasi PKK belum ada yang mana dana desa dipegang langsung oleh Kepala Desa, namun anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah tidak ada kejelasan.

### 3. Anti Kemiskinan

Dalam sub bab indikator ini anti kemiskinan berdasarkan teori Moser adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk membuat masyarakat sejahtera, yang bertujuan meningkatkan produktifitas perempuan miskin melalui organisasi ataupun komunitas dalam mengembangkan bakatnya dalam berkarya di dalam organisasi .

Berdasarkan hasil observasi Organisasi PKK desa Sumber Agung sudah mampu memberdayakan anggota dan kader PKK dalam meningkatkan ketrampilan dalam pembuatan kerajinan bunga dengan menggunakan barang bekas dari botol plastik.

### 4. Efisiensi

Dalam sub bab indikator ini efisiensi dalam teori Moser adalah suatu ukuran keberhasilan dalam meningkatkann partisipasi perempuan dalam organisasi.

Berdasarkan hasil observasi efisiensi dalam organisasi PKK desa Sumber belum baik dimana banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian petani, sebagaimana keadaan di desa tingkat pendidikan sangat

mempengaruhi pola pikir masyarakat. Tidak banyak dari mereka yang mau memikirkan sumbangsuhnya untuk kemajuan pembangunan di desanya. Mereka tidak mau ribet dengan membuat laporan-laporan terlebih jika mereka belum dijelaskan terlebih dahulu dan masih asing dengan teknologi.

### 5. Penguatan dan Pemberdayaan

Dalam sub bab indikator ini penguatan dan pemberdayaan teori Moser adalah proses dimana masyarakat memulai kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penguatan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi PKK di desa Sumber Agung belum ada, yang mana di desa Sumber Agung terdapat perilaku eksklusivitas yang dilakukan oleh anggota Organisasi PKK dengan masyarakat desa. Anggota PKK tidak mengikutsertakan masyarakat desa dalam pembuatan recayle barang bekas.

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa *Ideologi State Ibuism* pada gerakan PKK di desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan masih ada, walaupun *Ideologi State Ibuism* masih ada tetapi tidak menyurutkan keaktifan dari organisasi PKK dan tetap meletakkan perempuan pada posisi yang penting, hal tersebut dibuktikan dengan 5 analisis dari teori Moser, yaitu:

1. Peranan perempuan didalam keanggotaan PKK masih dikategorikan berada dalam ranah domestik, dimana masih melekatnya unsur-unsur Ibuisme Negara dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh PKK.
2. Implementasi regulasi dan Undang-Undang yang menyatakan bahwasanya PKK menjadi mitra pemerintah desa, namun dilapangan tidak berada dalam kondisi tersebut, dimana relasi kekuasaan masih dominan dipegang oleh laki-laki.
3. Perubahan arti nama PKK dari pembinaan ke pemberdayaan tidak memiliki perubahan di dalam kelembagaan PKK, hal tersebut dikarenakan pola relasi organisasi struktur masih menggunakan pola yang sama.

### DaftarPustaka

Amaliatulwalidain & Novia Kencana. 2018. *Reposisi Kultural Organisasi PKK dari Masa Orde Baru ke Reformasi di Desa Raksa Jiwa Kabupaten Komering Ulu*. Palembang : Universitas Indo Global Mandiri.

Crasswell. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: pustaka Pelajar.

Ekaputri, A. O. 2012. *Gerakan Organisasi Perempuan (PKK) dalam Pemberdayaan Lansia Gemawang Sinduadu, Mliati, Sleman Yogyakarta*. Skripsi Tidak Diterbitkan .

Fahih, Mansour. 2001. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Handayani, T. 2005. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM.

Herawati, E. (2016). 2016. *Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Kemasyarakatan Pasca Reformasi*. Seminar Nasional Politik dan Kebudayaan Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Pajajaran.

Jovani, A. 2016. *PKK Sebagai Organisasi Gerakan Perempuan*. Prodi Ilmu Politik. Universitas Kristen Indonesia.

Lodovikus Bomans Wadu, dkk. 2018. *Faktor pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK*. Universitas Kanjuruhan Malang. Hal. 62

Nengyanti, Delfiaza.P.L & Isabella. 2014. *Analisis Penerapan Gender Responsiveness Dalam Penyusunan Program/Proyek/Kegiatan Program Kemiskinan Dalam Rangka Menyusun Model Formulasi Program Pembangunan Daerah*. Universitas Sriwijaya.

Nina Rosa Riana, D. 2015. *Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pemberdayaan Pemberdayaan* . Jurnal Administrasi Publik , Vol.2, No.5.

Pratiwi, R. Z. 2015. *Pola Komunikasi Perempuan dalam mengkonstruksi Identitas Gender pada Gerakan PKK*. Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta .

Saparwadi. 2016. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)* . Studi di Kampung Demangan Rw 05, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman .

Rahmawati, Harum Aulia. 2017. *Efek Pelatihan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Dalam Kegiatan Penimbangan Batita Pada Kader Posyandu Di Kelurahan Rengas Kota Tangerang Selatan Tahun*.

Sri Ulina Beru Ginting, E. N. 2016. *Ideologi Gender Pada Perempuan Batak Karo dan Perempuan Jawa Di Desa Purwobinangun*. Jurnal Psikologi.

Sujarman, K. 2018. *Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan PKK untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga*.

Supriyadi. 2016. *Pemberdayaan Kader PKK Melalui Kegiatan PKK Di Desa Bnyusidi Kecamatan Kabupaten Magelang* .

Wicaksono, M. 2016. *Ibuisme Masa Kini : Suatu Etnografi Tentang Posyandu dan Ibu Rumah Tangga : Studi di Daerah RW 02 Kelurahan Ciptomulya, Kecamatan Sukun, Kota Malang*. Universitas Indonesia.

Widiyaning, A. R. 2013. *Peran PKK dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan Di Kota Semarang 1972-1998*.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri No:411.4-3514 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pkk Tentang Rakernas VIII PKK Tahun 2015.
- Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Ansari, Fitriyanti. 2018. *Peran PKK Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat*. [https://sipuu.sektab.go.id/puu/buka\\_puu/1753141/erpres%20Nomor%2099%20Tahun%202017.pdf](https://sipuu.sektab.go.id/puu/buka_puu/1753141/erpres%20Nomor%2099%20Tahun%202017.pdf). (diakses senin, 22 Juli 2019)
- BIBLIOGRAPHY Dewi, K. 2016. *Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18102/3/Chapter%2011.pdf>. (diakses Kamis 11 Juli 2019. Pukul 03.31)
- Jovani, A. 2016. *PKK Sebagai Organisasi Gerakan Perempuan*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/58811/Chapter%2011.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. (Diakses Kamis 11 Juli 2019. Pukul 03.31)
- Potret Kemiskinan. (2011). [http://wri.or.id/files/PotretKemiskinan\\_02\\_Tulisan\\_I.pdf](http://wri.or.id/files/PotretKemiskinan_02_Tulisan_I.pdf). (diakses senin, 22 Juli 2019)
- Rantung, J. 2019. *Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Ongkau I Kabupaten Minahasa Selatan*. <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125919-RB011294p-Perselingkuhan%20sebagai-Literatur.pdf>. (Diakses Kamis 11 Juli 2019, Pukul 19.47)
- Rodiah, S. 2016. *Pemberdayaan Kader PKK Dalam Usaha Penyebarluasan Informasi Kesehatan Jatinangor*. <http://www.lontar.ui.ac.id/life?file=digital/125919-RB011294p-Perselingkuhan%20sebagai-Literatur.pdf>. (Diakses Kamis 11 Juli 2019, Pukul 19.21)
- Trisnawari, N. A. 2017. *Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik*. <http://tipsserbaserbi.blogspot.com/2016/10/pengertian-gender-kesetaraan-gender-dan-istilah-terkait.html?m=1>. (Diakses Kamis 11 Juli 2019, Pukul 19.54)